

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan kepada data dari *World Tourism Barometer* yang diterbitkan oleh (UNWTO, 2023) pariwisata global mengalami pemulihan yang kuat setelah pandemi COVID-19. Pada tahun 2023, sektor pariwisata menyumbang 9,1% terhadap PDB global, yang menandai peningkatan yang signifikan, meskipun masih sedikit di bawah puncaknya pada tahun 2019 sebesar 10,4%. Industri ini menambahkan 27 juta pekerjaan baru, memulihkan 98,6% dari tingkat pekerjaan sebelum pandemi. Kedatangan wisatawan internasional diperkirakan akan menutup tahun 2023 pada 87% dari tingkat sebelum pandemi, didorong oleh permintaan yang kuat di banyak wilayah. Eropa mencapai 94% dari tingkat kunjungan wisatawan tahun 2019, sementara Timur Tengah mengungguli dengan melampaui angka sebelum pandemi sebesar 20%.

Diantara negara-negara yang kembali pulih setelah selesainya pandemi COVID-19, Indonesia menjadi salah satu negara yang industri pariwisatanya kembali pulih dan semakin berkembang, Pariwisata di Indonesia saat ini menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang kuat setelah mengalami dampak besar akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2023, tercatat 8,51 juta kunjungan wisatawan asing selama tiga kuartal pertama, menghasilkan devisa sebesar 10,46 miliar USD dengan rata-rata kunjungan menghasilkan 1.230 USD per wisatawan asing (Indonesia *investment*). Pada tahun 2024, Meskipun jumlah kunjungan wisatawan masih belum kembali ke tingkat sebelum pandemi (16,11 juta pada 2019), tren pertumbuhannya sangat positif, terutama karena dipercepat oleh

peningkatan minat wisata domestik dan mancanegara. Pada 2023, Indonesia mencatat 8,51 juta kunjungan wisatawan mancanegara, yang merupakan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan beberapa destinasi utama yang dikunjungi oleh wisatawan mancanegara antara lain: Bali, Lombok, dan Labuan Bajo.

Sebagai salah satu wajah dari industri pariwisata Indonesia, Bali menjadi salah satu tujuan utama wisatawan domestik maupun mancanegara. Pada tahun 2023, Bali mengalami perkembangan signifikan dalam sektor pariwisata, terutama dalam hal kunjungan wisatawan mancanegara. Hingga bulan Desember 2023, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali mencapai lebih dari 5,2 juta kunjungan, dengan Australia menjadi penyumbang terbesar dengan persentase 25,7% dari total kunjungan pada bulan Desember. Secara keseluruhan, periode Januari hingga November 2023 mencatat sebanyak 10,4 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, dengan Bali sebagai tujuan utama. Bandara Ngurah Rai menjadi pintu masuk utama bagi 396.238 wisatawan mancanegara pada November. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022, kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali mengalami peningkatan sebesar 194,33% (BPS Provinsi Bali, 2025).

Berdasarkan temuan data yang diperoleh dari Badan Statistik provinsi Bali, terdapat peningkatan yang signifikan dalam jumlah wisatawan selama beberapa tahun terakhir, khususnya antara tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2024, jumlah wisatawan yang mengunjungi Bali tercatat mencapai lebih dari 16 juta pengunjung, yang terdiri dari 6 juta wisatawan mancanegara dan 10 juta wisatawan domestik.

Data tersebut menunjukkan adanya tren positif yang berkelanjutan dalam jumlah kunjungan wisatawan ke Bali selama beberapa tahun terakhir.

Tabel 1 Jumlah Kunjungan Mancanegara dan Domestik

Data Kunjungan	2020	2021	2022	2023	2024
M mancanegara	1,069,473	51	2, 155,747	5,273,258	6,333,360
Domestik	4,596,157	4,301,592	8,052,974	9,877,911	10,120,786
Jumlah	5,665,630	4,301,643	10,208,721	15,151,169	16,454,146

Sumber: Diolah Penulis dari data terbitan Badan Pusat Statistika Provinsi Bali (2025)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Bali masih mengalami pertumbuhan yang substansial di sektor pariwisata. Hal ini ditandai dengan persentase pertumbuhan pariwisata Bali yang terus meningkat, yang mencapai 48,41% pada tahun 2022 - 2023.

Namun, lonjakan kunjungan wisatawan tersebut juga menimbulkan fenomena yang dikenal sebagai *overtourism*. *Overtourism* terjadi ketika jumlah wisatawan yang mengunjungi suatu destinasi melebihi kapasitas fisik, lingkungan, dan sosial tempat tersebut, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas hidup masyarakat lokal, Dampak *overtourism* di Bali, menciptakan berbagai tantangan serius yang mengganggu keseimbangan antara pariwisata dan keberlanjutan lingkungan serta sosial. Salah satu dampak paling mencolok adalah Dampak *overtourism* terhadap kesejahteraan sosial dan budaya lokal. Pertama, interaksi yang intens antara wisatawan dan penduduk lokal sering kali menyebabkan perubahan sosial yang signifikan. Banyak warga yang beradaptasi dengan tuntutan industri pariwisata,

mengubah cara hidup mereka untuk memenuhi ekspektasi wisatawan. Hal ini dapat mengarah pada komersialisasi budaya, di mana tradisi dan praktik lokal diubah demi menarik minat pengunjung, yang pada gilirannya mengurangi makna dan keaslian dari budaya tersebut. Selain itu, ketegangan sosial sering kali muncul di antara penduduk, terutama ketika arus wisatawan meningkat. Beberapa penduduk merasa terganggu oleh kerumunan yang mengganggu kehidupan sehari-hari mereka, dan ada kekhawatiran bahwa pariwisata telah menciptakan kesenjangan antara penduduk lokal dan industri yang berfokus pada keuntungan.

Adapun daerah yang menjadi fokus pada penelitian ini antara lain Kab. Badung, Kota. Denpasar, Kab. Gianyar dan Kab. Buleleng, dengan mengunjungi kawasan-kawasan wisata yang menjadi pusat ramai wisatawan di daerah-daerah tersebut. Peneliti memilih kawasan-kawasan ini dinilai sangat cocok menjadi lokasi penelitian dikarenakan jumlah kunjungannya tertinggi di antara yang lain sehingga cocok menjadi objek penelitian.

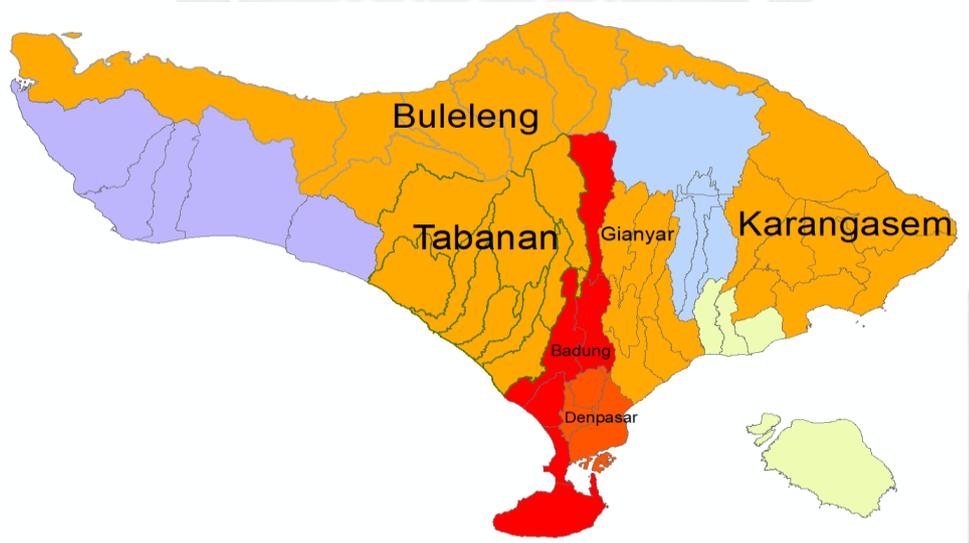
Tabel 2 Jumlah kunjungan wisatawan berdasarkan daerah

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Jembrana	591,346	675,711	828,046	1,038,371	946,771
Kab. Tabanan	911,255	897,066	991,864	1,397,417	1,920,249
Kab. Badung	1,947,336	2,260,548	4,631,992	6,606,807	6,745,502
Kab. Gianyar	918,217	1,057,811	1,271,999	1,759,141	2,193,135
Kab. Klungkung	576,157	694,888	764,254	1,037,433	1,037,570
Kab. Bangli	753,697	764,282	922,264	1,486,887	1,079,658

Kab. Karangasem	863,036	1,066,839	1,319,339	1,916,732	1,972,943
Kab. Buleleng	1,167,720	1,308,959	1,545,531	2,063,981	2,270,462
Kota Denpasar	1,090,766	1,259,006	1,984,425	3,526,734	4,478,649
Provinsi Bali	8,819,530	9,985,110	14,259,714	20,833,503	22,644,939

Sumber: Diolah Penulis dari data terbitan Badan Pusat Statistika Provinsi Bali (2025)

Gambar 1 Peta jumlah kunjungan



Sumber: Diolah oleh Penulis (2025)

Selain itu, penting untuk mengembangkan kegiatan pariwisata berkelanjutan di destinasi dalam jangka panjang, yang bertujuan untuk memperpanjang keberadaannya untuk melindungi sumber daya pariwisata yang ada dan terus berkontribusi pada manfaat ekonomi jangka panjang dari pariwisata di destinasi tersebut (Liu, 2003; Choi & Sirakaya, 2006, dalam Putu dkk. , 2024). dari segi infrastruktur, jumlah wisatawan yang berlebihan telah menyebabkan kemacetan dan tekanan pada layanan publik, membuat kehidupan sehari-hari masyarakat semakin sulit. Keterbatasan dalam sistem transportasi dan fasilitas umum sering

kali membuat penduduk lokal merasa terganggu oleh kehadiran wisatawan yang terus meningkat. Semua faktor ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih berkelanjutan dalam pengelolaan pariwisata di Bali untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan kelestarian budaya lokal.

Bali, sebagai salah satu tujuan destinasi, kini menghadapi fenomena *overtourism*. “However, the success of promoting sustainable tourism has led to *overtourism* in the region. This study aims to analyse how the community can maintain sustainable tourism and at the same time ensure the sustainability of their income generating activities” (Nurrohmah dkk. , 2024).

Jumlah wisatawan yang terus meningkat setiap tahunnya membawa dampak *positif*, terutama dalam hal pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata. Namun, di sisi lain, masyarakat lokal mulai merasakan dampak *negatif* yang signifikan. Masalah-masalah seperti kemacetan lalu lintas, peningkatan harga lahan dan kebutuhan pokok, hingga perubahan pola kehidupan sosial masyarakat setempat mulai menimbulkan keresahan. Sebagian besar penulis menganggap *overtourism* sebagai persepsi subjektif dari para pelaku pariwisata, dan menyebutnya sebagai situasi di mana penduduk lokal, wisatawan, atau keduanya merasa bahwa suatu destinasi memiliki terlalu banyak turis sehingga mengubah karakternya, kehilangan keasliannya, dan menyebabkan keresahan dan gangguan (Capocchi dkk. , 2019; Dodds & Butler, 2019; Doxey, 1975). Faktor umum dalam definisi di atas adalah bahwa perhatian utama diberikan pada bagaimana pariwisata yang berlebihan mempengaruhi kualitas hidup penduduk.

Dalam penelitian “Analisis Model Gerakan *Anti-Tourism* dalam Merespon Praktik *Overtourism* di Barcelona, Venice, Hawaii” (Alimuddin & Rosnani, 2023) ada beberapa faktor suatu kawasan dapat dikategorikan termasuk ke dalam fenomena *overtourism*, ditekankan disana bahwa *overtourism* tidak hanya dipicu oleh jumlah wisatawan tapi juga disebabkan oleh berbagai hal antara lain:

Kepadatan wisatawan melawan penduduk lokal, Kepadatan wisatawan yang tinggi dapat menyebabkan ketidak seimbangan antara jumlah pengunjung dan penduduk lokal di suatu destinasi. Ketika wisatawan mendominasi ruang publik, fasilitas, dan sumber daya lokal, masyarakat setempat dapat merasa terpinggirkan. Aktivitas keseharian warga terganggu oleh kemacetan, keramaian, hingga perubahan fungsi ruang yang dulunya digunakan untuk kegiatan komunitas menjadi area komersial.

"Overcrowding in city's public spaces, tourists' behavior and physical touristification. can all be identified, but interviewees also recognized displacement due to AirBnB and similar platforms and excessive pressure on the local environment as separate. " (Koens dkk. , 2018)

Hal ini menciptakan konflik sosial dan menurunkan kualitas hidup masyarakat lokal di tengah dominasi kepentingan industri pariwisata. Kurangnya kebijakan pengendalian pengunjung Ketiadaan regulasi atau kebijakan pengendalian jumlah kunjungan menjadi salah satu penyebab utama *overtourism*. Banyak destinasi wisata tidak memiliki sistem pembatasan pengunjung, baik berupa *kuota* harian, zonasi wisata, atau mekanisme pemantauan arus wisatawan. Tanpa kendali yang memadai, destinasi wisata menerima kunjungan melebihi daya dukung lingkungan dan sosial. Hal ini memperparah tekanan terhadap infrastruktur, meningkatkan

risiko kerusakan aset wisata, dan mengurangi kenyamanan baik bagi wisatawan maupun masyarakat lokal.

Kenaikan harga kebutuhan hidup Meningkatnya permintaan barang dan jasa akibat arus wisatawan mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok di daerah wisata. Harga tanah, sewa properti, makanan, serta kebutuhan sehari-hari menjadi lebih mahal dan sulit dijangkau oleh warga lokal

"Sedangkan indikasi dampak negatif terhadap ekonomi lokal berupa kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. " Khrisnamurti, dkk. (2016) dalam (Zafirah & Dewi, 2022)

Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa mendorong terjadinya gentrifikasi, di mana penduduk lokal terpaksa meninggalkan wilayah tempat tinggal mereka karena tidak mampu bersaing secara ekonomi. Akibatnya, terjadi ketimpangan sosial dan ketidakadilan distribusi manfaat dari industri pariwisata.

Tekanan terhadap infrastruktur, Infrastruktur yang tidak disiapkan untuk menampung jumlah wisatawan yang besar akan mengalami tekanan berlebihan. Fasilitas seperti jalan, jembatan, tempat parkir, toilet umum, pengelolaan limbah, serta pasokan air dan listrik dapat mengalami kelebihan kapasitas, bahkan kerusakan. Kemacetan lalu lintas yang kerap terjadi menjadi salah satu indikator tekanan infrastruktur tersebut. Ketika prioritas pelayanan publik diberikan kepada wisatawan, masyarakat lokal kerap mengalami penurunan kualitas layanan dasar yang mereka butuhkan.

Degradasi budaya dan identitas lokal, Pariwisata massal sering kali mendorong masyarakat lokal untuk mengubah atau bahkan menjual budaya mereka demi memenuhi ekspektasi wisatawan. Pertunjukan budaya dan upacara adat dikemas

sedemikian rupa agar lebih menarik secara komersial, yang berisiko menghilangkan makna spiritual dan sosial aslinya. Identitas budaya yang dulunya bersifat otentik, perlahan-lahan berubah menjadi produk wisata. Akibatnya, generasi muda lebih tertarik pada sektor pariwisata daripada mewarisi dan melestarikan tradisi yang dalam jangka panjang mengancam keberlanjutan budaya lokal.

Kurangnya partisipan warga dalam pengelolaan pariwisata, Warga lokal sering kali hanya dijadikan sebagai objek bukan subjek dalam pengelolaan pariwisata. Kebijakan dan rencana pengembangan pariwisata lebih banyak disusun oleh pemerintah dan pelaku usaha, tanpa melibatkan partisipasi aktif dari komunitas lokal. Ketidakterlibatan ini menyebabkan warga merasa tidak memiliki kontrol terhadap arah perkembangan daerah mereka sendiri. Kurangnya ruang dialog antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku industri menjadikan upaya pengelolaan pariwisata berkelanjutan tidak efektif dan sering kali tidak berpihak pada kepentingan masyarakat lokal, Sedangkan dalam penelitian “*Preventing Overtourism by Identifying the Determinants of Tourists’ Choice of Attractions*” (Padrón-Ávila & Hernández-Martín, 2019) Penelitian ini menyelidiki determinan pilihan wisatawan yang berkontribusi terhadap fenomena *overtourism* dan mengusulkan pendekatan prediktif untuk mengidentifikasi kawasan yang berisiko mengalami tekanan turistik berlebihan, beberapa faktor kawasan dikategorikan dalam *overtourism* antara lain: Kepadatan wisatawan per meter persegi Kepadatan wisatawan yang tinggi dalam suatu area sempit menciptakan tekanan fisik terhadap ruang dan fasilitas publik. Di beberapa lokasi wisata populer seperti pusat kota atau objek wisata alam, jumlah pengunjung per-meter persegi sering kali melebihi batas

ideal. Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan, antrean panjang, hingga berkurangnya pengalaman wisata itu sendiri. Selain itu, tekanan fisik dari kerumunan ini dapat merusak elemen-elemen lingkungan seperti jalur *trekking* taman, hingga struktur bersejarah, dan mengganggu aktivitas lokal sehari-hari.

Ketergantungan ekonomi lokal, Ketika ekonomi suatu daerah sangat bergantung pada sektor pariwisata, risiko kerentanan meningkat drastis. Jika terjadi penurunan jumlah wisatawan karena krisis global, bencana alam, atau pandemi maka dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat lokal, khususnya yang bekerja di sektor informal, banyak warga bergantung pada penghasilan dari *homestay*, restoran dan toko oleh-oleh. Ketergantungan ini juga menghambat diversifikasi ekonomi, membuat daerah sulit bangkit jika sektor pariwisata terganggu. Degradasi lingkungan dan sosial *Overtourism* sering kali menyebabkan kerusakan ekologis seperti pencemaran air, peningkatan volume sampah, dan erosi tanah di lokasi wisata alam. Selain itu, interaksi yang terlalu intensif antara wisatawan dan warga lokal juga dapat memicu konflik nilai dan budaya. Di banyak tempat, muncul ketegangan sosial akibat perbedaan kebiasaan dan ketidak hormatan terhadap norma lokal. Dalam jangka panjang, kondisi ini memperlemah struktur sosial dan mengurangi kualitas hidup penduduk asli.

Kurangnya kapasitas infrastruktur lokal, Infrastruktur yang tidak dirancang untuk menampung jumlah wisatawan yang besar akan cepat mengalami kelebihan beban. Sistem jalan, transportasi umum, sanitasi dan pengelolaan limbah menjadi tidak memadai. Jalanan sempit dan kurangnya tempat parkir menyebabkan

kemacetan kronis, terutama saat musim puncak. Ketika infrastruktur tidak ditingkatkan seiring pertumbuhan pariwisata, masyarakat lokal dan wisatawan sama-sama mengalami penurunan kualitas layanan dan kenyamanan. Tidak seimbang jumlah pengunjung setiap musim dan Ketimpangan kunjungan antara musim ramai dan sepi menyebabkan masalah distribusi ekonomi dan manajemen destinasi. Pada musim puncak, destinasi bisa kewalahan menerima jumlah wisatawan yang besar, sedangkan di luar musim tersebut, banyak pelaku usaha wisata mengalami penurunan pendapatan drastis. Fluktuasi ini menyulitkan perencanaan jangka panjang dan keberlanjutan usaha kecil. Di sisi lain, fasilitas dan sumber daya menjadi tidak efisien karena hanya digunakan secara maksimal pada waktu-waktu tertentu.

Kurangnya regulasi dan kebijakan dalam mengelola jumlah, perilaku, dan distribusi wisatawan menjadi Salah satu penyebab utama *overtourism*. Tanpa kebijakan pembatasan atau pengaturan kunjungan, banyak destinasi dibiarkan berkembang secara tidak terkendali. Hal ini menciptakan kerusakan jangka panjang terhadap lingkungan dan budaya lokal. Selain itu, absennya pengawasan juga membuka peluang bagi eksploitasi pariwisata oleh pihak-pihak tertentu tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan keberlanjutan destinasi itu sendiri. Dalam konteks sosial, keberadaan wisatawan yang begitu banyak menyebabkan masyarakat lokal merasa tersingkirkan dari tanah mereka sendiri. Kebisingan dan keramaian yang meningkat turut mengubah suasana Bali yang dulunya dikenal tenang dan damai. Dalam beberapa kasus, masyarakat setempat merasa tidak lagi memiliki kendali atas wilayah mereka, karena orientasi kebijakan

lebih berpihak pada pemenuhan kebutuhan wisatawan daripada kepentingan komunitas lokal.

Dua faktor kontekstual dipilih karena pemerintah daerah memiliki kapasitas untuk mengelolanya dan karena bukti sebelumnya telah menunjukkan relevansinya. Faktor pertama adalah pengelolaan pemerintah daerah terhadap dampak pariwisata yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan kualitas hidup penduduk (misalnya, lalu lintas, keamanan, pengelolaan limbah). Faktor kedua terkait dengan kualitas pariwisata, yang dipahami sebagai persepsi penduduk terhadap wisatawan di tempat tujuan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perilaku wisatawan dan bukan hanya jumlah wisatawan dapat menjelaskan reaksi penduduk terhadap pariwisata (yang berlebihan) (Ap & Crompton, 1993; Loi & Pearce, 2015 dalam García-Buades dkk. , 2022). Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi apakah manajemen pemerintah daerah dan perilaku wisatawan mempengaruhi *overtourism* dan dampaknya terhadap persepsi dan sikap penduduk terhadap destinasi. Memajukan pengetahuan kita tentang perspektif penduduk tentang *overtourism* akan membantu pembuat kebijakan membuat keputusan yang tepat untuk melindungi destinasi agar berkelanjutan bagi penduduk dan wisatawan: tempat yang baik untuk ditinggali dan tempat yang baik untuk dikunjungi (Adie & Falk, 2021 dalam García-Buades dkk. , 2022).

Beberapa penulis berpendapat bahwa pariwisata yang berlebihan dapat menimbulkan ketegangan dan reaksi *negatif* di antara penduduk setempat (Namberger, Jackisch, Schmude, & Karl, 2019; Saveriades, 2000 dalam García-Buades dkk. , 2022). Yang lain berpendapat bahwa reaksi *negatif* bergantung pada

faktor intrinsik yang terkait dengan penduduk (misalnya karakteristik demografis, bekerja di sektor pariwisata, tingkat kontak dengan wisatawan) (Adie & Falk, 2021 dalam García-Buades dkk. , 2022) 'Pariwisata yang berlebihan' dapat mengganggu kualitas hidup penduduk dalam kegiatan sehari-hari (lalu lintas, belanja, berjalan kaki, dll.) Penduduk mungkin akan merasakan dampak negatif pariwisata melebihi dampak positifnya, cara hidup setempat dan lingkungan setempat terancam dan menjadi kurang menarik bagi penduduk dan wisatawan (penurunan tujuan wisata) (Butler, 1980 dalam Butler & Dodds, 2019), dan penduduk dapat mengembangkan sikap atau perilaku negatif terhadap pariwisata atau wisatawan (kejengkelan, permusuhan) (Doxey, 1975).

Overtourism harus diantisipasi dan ditanggapi dengan serius karena fenomena ini memiliki banyak dampak *negative* yang dapat berdampak pada masyarakat, pariwisata dan kepada sektor lainnya, *Overtourism* dapat menyebabkan tekanan besar pada lingkungan alam, terutama di destinasi yang rentan seperti kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Menurut Peeters dkk. (2018) dalam Putu dkk. (2024), sekitar 80% pariwisata global terjadi di wilayah pesisir, yang mengakibatkan kerusakan ekosistem, pencemaran, dan konsumsi sumber daya yang berlebihan. Konsumsi air dan energi oleh wisatawan sering kali melebihi kapasitas regeneratif lingkungan setempat, mempercepat degradasi lingkungan. Kehadiran wisatawan dalam jumlah besar dapat mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat lokal. Fenomena ini sering kali menyebabkan gentrifikasi, di mana harga properti dan biaya hidup meningkat, memaksa penduduk asli untuk pindah. Studi oleh Milano dkk. (2024) menunjukkan bahwa *overtourism* dapat mengurangi kualitas hidup

penduduk lokal dan memicu protes sosial. Meskipun pariwisata dapat meningkatkan pendapatan daerah, ketergantungan yang berlebihan pada sektor ini membuat ekonomi lokal rentan terhadap fluktuasi global. Laporan dari European Parliament oleh Peeters (2018) menyoroti bahwa *overtourism* dapat menyebabkan inflasi harga barang dan jasa, serta menciptakan lapangan kerja dengan kondisi kerja yang buruk. Fenomena ini juga dapat berdampak pada kualitas wisatawan. *Overcrowding* atau kepadatan berlebihan di destinasi wisata dapat mengurangi kenyamanan dan kepuasan wisatawan. Berdasarkan data dari forum *World Tourism Organization Joins Asia-Pacific Sector Leaders To Address Overcrowding In Urban Destinations* yang diterbitkan oleh (UNWTO, 2019), pengalaman negatif akibat *overtourism* dapat merusak citra destinasi dan mengurangi minat kunjungan di masa depan.

Beberapa contoh kasus dari dampak *negatif overtourism* yang terjadi antara lain: Degradasi Lingkungan yang terjadi pada Pulau Boracay, Filipina. Pada tahun 2018, pemerintah Filipina menutup Pulau Boracay selama 6 bulan karena kerusakan lingkungan akibat *overtourism*. Kunjungan wisatawan ke Boracay saat itu mencapai lebih dari 2 juta per tahun, jauh melebihi kapasitas ekologisnya sehingga menyebabkan sistem pembuangan limbah tidak memadai dan sebagian besar limbah langsung dibuang ke laut.

Ketegangan Sosial yang terjadi pada kota Barcelona, Spanyol. Barcelona menjadi contoh kota yang mengalami dampak sosial *overtourism*. Warga melakukan protes terhadap peningkatan sewa, gentrifikasi, dan berkurangnya

ruang publik. Pada tahun 2017, lebih dari 30 juta turis mengunjungi kota yang hanya berpenduduk sekitar 1,6 juta penduduk.

Degradasi Budaya yang terjadi pada kota Venesia, Italia. Venesia mengalami degradasi budaya akibat kedatangan lebih dari 25 juta wisatawan per tahun. Kota ini menghadapi penurunan jumlah penduduk lokal (turun dari 175.000 menjadi di bawah 50.000 dalam 50 tahun). Tradisi dan kehidupan lokal tergeser oleh komersialisasi pariwisata dan ekonomi.

Overcrowding & Penurunan Kualitas Wisata pada kota Machu Picchu, Peru. Machu Picchu menghadapi tekanan besar akibat kunjungan harian yang melebihi 5.000 orang, melampaui batas yang ditetapkan UNESCO yaitu 2.500 pengunjung/hari. Hal ini menurunkan kualitas pengalaman wisata dan berisiko merusak situs warisan dunia tersebut.

Dialansir dari beberapa artikel berita yang dirilis oleh (Kamada beberapa perilaku *negatif* yang dilakukan wisatawan mancanegara antara lain, Vandalisme, Perilaku yang tidak menghargai adat dan budaya, Pencurian truk, Melakukan perilaku asusila, Kekerasan terhadap masyarakat lokal, Membuka usaha illegal.

Overtourism di Kawasan Kuta dan Seminyak. Kawasan Kuta dan Seminyak, sebagai bagian dari destinasi utama di Bali Selatan, menunjukkan tanda-tanda *overtourism* yang parah. Studi oleh (Aryani & Mustika, 2021) mencatat bahwa volume wisatawan yang tinggi telah menyebabkan berbagai dampak negatif, termasuk penurunan kualitas lingkungan pantai, kemacetan lalu lintas, dan peningkatan emisi karbon serta limbah plastik. Selain itu, konversi lahan menjadi

hotel dan tempat hiburan telah mengikis ruang hijau yang sebelumnya berfungsi sebagai area penyerapan air dan zona ekologi.

Overtourism di Ubud. Ubud, sebagai destinasi budaya dan spiritual, juga tidak luput dari tekanan *overtourism*. Studi oleh (Suryawan, 2021) menunjukkan bahwa Ubud mengalami pergeseran karakter budayanya akibat lonjakan wisatawan asing. Masuknya investasi besar ke sektor pariwisata perhotelan dan wellness telah mengubah struktur ruang dan hubungan sosial komunitas lokal.

Kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan tekanan pada fasilitas umum menjadi masalah kritis di Ubud. Selain itu, menurut penelitian (Suryawan, 2021), banyak upacara tradisional dan praktik lokal harus menyesuaikan jadwalnya akibat intensitas aktivitas turis, menimbulkan kekhawatiran tentang hilangnya keaslian budaya Bali.

Overtourism di Desa Penglipuran. Desa Penglipuran, salah satu desa wisata paling populer di Bali, menghadapi tantangan serius dalam menjaga keseimbangan antara daya tarik budaya dan tekanan jumlah pengunjung. Penelitian (Artawan, 2020) menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pengunjung, melebihi 3.000 wisatawan per hari, telah berdampak langsung pada kualitas lingkungan desa, termasuk peningkatan volume sampah dan degradasi area hutan bambu.

Dengan adanya fenomena *overtourism* ini, reaksi masyarakat setempat terhadap perubahan yang terjadi cukup beragam. Sebagian besar dari mereka mulai menunjukkan tingkat keresahan yang tinggi terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pariwisata masif ini. Muncul berbagai aksi protes atau permintaan untuk

adanya regulasi yang lebih ketat dalam mengatur arus wisatawan, seperti pembatasan jumlah pengunjung atau pengelolaan yang lebih berkelanjutan

“Regarding perceived tourist behavior, results showed a direct effect on residents’ perception of the destination as a GPL and a moderating effect, the effects of overtourism on residents’ perception of the destination as a GPL is conditioned by their perceptions of tourist behavior” (García-Buades dkk. , 2022).

Belum ada penelitian terdahulu yang menyatakan dengan pasti bahwa Bali mengalami *overtourism* tapi data perkembangan jumlah wisatawan di Bali yang terus meningkat dan juga dengan upaya pemerintah Bali yang terus meningkatkan jumlah kunjungan ke Bali setiap tahun, hal ini berpotensi menyebabkan fenomena *overtourism* di Bali. Fenomena *overtourism* di Bali perlu untuk diantisipasi untuk keberlanjutan sektor pariwisata di Bali, sehingga *visitor management* menjadi salah satu pilihan yang baik untuk situasi sekarang untuk mencegah potensi fenomena tersebut.

Visitor management, yang umumnya dikenal sebagai pengelolaan pengunjung, merupakan bagian dari pengelolaan destinasi pariwisata yang mengatur pengelolaan pengunjung agar destinasi pariwisata dapat mempertahankan dan meningkatkan daya tariknya, sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan dan menciptakan dampak positif bagi wisatawan, masyarakat lokal, pelaku usaha, pemerintah, dan lingkungan lokal, seperti yang ditekankan oleh (Damanik & Teguh, 2013)

Pengelolaan pengunjung telah muncul sebagai salah satu strategi kunci dalam mengurangi dampak *overtourism*. Pengelolaan pengunjung mencakup berbagai

pendekatan dan kebijakan yang dirancang untuk mengatur, mengarahkan, dan mengontrol aliran kunjungan wisatawan agar tidak melebihi kapasitas tampung destinasi. Menurut (McCool & Lime, 2001), pendekatan manajemen pengunjung yang efektif harus mempertimbangkan tiga dimensi utama: jumlah pengunjung, perilaku pengunjung, dan distribusi spasial dan temporal kunjungan. Alat-alat yang umum digunakan meliputi sistem kuota, pemesanan online, zonasi, penyediaan informasi edukatif, dan pengembangan rute wisata alternatif.

Peran pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan pemangku kebijakan sangat berperan penting terhadap regulasi dan peraturan yang dinilai bermanfaat untuk mencegah potensi terjadinya *overtourism*. Menurut Studi oleh (McCool & Lime, 2001) menekankan bahwa kesuksesan pengelolaan pengunjung sangat dipengaruhi oleh keterlibatan pemangku kepentingan lokal dan pemahaman terhadap karakteristik wisatawan. Studi serupa oleh (Choi & Sirakaya, 2006) menunjukkan bahwa destinasi yang menerapkan pengelolaan pengunjung partisipatif memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan keberlanjutan jangka panjang. Ada tiga strategi dalam manajemen pengunjung (Orams M, 1995):

Manajemen fisik, yang berarti mengelola interaksi antara pengunjung dan sumber daya yang tersedia untuk meminimalkan dampak dan hambatan dalam penggunaan fasilitas fisik oleh pengunjung.

Pengelolaan regulasi, yang melibatkan pengendalian langsung berupa peraturan, izin, dan biaya yang dikenakan pada pengunjung, serta mengatur perilaku mereka selama berada di lokasi wisata;

Mekanisme tidak langsung yang bertujuan untuk secara sukarela mengurangi perilaku yang tidak pantas melalui pendidikan dan interpretasi.

Dalam perencanaan manajemen pengunjung, ada tiga tahap penting, yaitu tahap persiapan, tahap pengembangan, dan tahap implementasi dan pemasaran (El-Barmelgy, 2013).

Tahap persiapan, Tahap persiapan merupakan tahap penting dalam manajemen pengunjung. Pada tahap ini, masalah diidentifikasi dan solusi potensial dikembangkan. Pada tahap ini, semua pemangku kepentingan pariwisata yang terlibat bersatu suara dan berkomitmen untuk kesuksesan manajemen pengunjung.

Tahap pengembangan, Tahap kedua adalah pengembangan, yang melibatkan perancangan semua mekanisme dan prosedur yang akan diimplementasikan di destinasi wisata.

Tahap implementasi, Tahap akhir adalah implementasi, di mana mekanisme, prosedur, dan peraturan yang dikembangkan langsung diterapkan. Selama proses ini, evaluasi juga dilakukan untuk menilai efektivitas dan masalah yang timbul selama implementasi.

Pengelolaan pengunjung merupakan pendekatan strategis yang digunakan dalam manajemen pariwisata untuk menjaga keberlanjutan destinasi dengan mengatur jumlah pengunjung, dan distribusi pengunjung. Berbagai studi menunjukkan bahwa penerapan pengelolaan pengunjung yang tepat dapat

memberikan manfaat yang signifikan, baik secara ekologi, sosial, maupun ekonomi.

Manfaat-manfaat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Konservasi Lingkungan, Salah satu tujuan utama pengelolaan pengunjung adalah untuk melestarikan lingkungan fisik dan ekosistem destinasi wisata. Pengaturan jumlah pengunjung dan perilaku wisatawan dapat secara langsung mengurangi dampak negatif terhadap sumber daya alam. (Manning, 2001) menekankan bahwa pengendalian pengunjung melalui sistem zonasi, batasan kunjungan harian, dan pendidikan pengunjung secara signifikan mengurangi degradasi lingkungan seperti erosi tanah, polusi, dan kerusakan habitat flora dan fauna. Studi serupa oleh (Leung dkk., 2018) menyatakan bahwa pengelolaan pengunjung di kawasan konservasi memainkan peran penting dalam menjaga kapasitas tampung ekologi destinasi.

Mencegah dan Mengendalikan *Overtourism*, Pengelolaan pengunjung merupakan salah satu solusi paling efektif dalam mengatasi gejala *overtourism*. Ketika jumlah kunjungan wisatawan melebihi kapasitas tampung suatu destinasi, berbagai dampak negatif akan timbul, baik terhadap lingkungan, masyarakat, maupun budaya lokal. Milano dkk. (2019) menunjukkan bahwa kota-kota seperti Amsterdam dan Venesia berhasil mengurangi tekanan *overtourism* melalui penerapan kuota pengunjung, pengalihan kunjungan ke zona alternatif, dan sistem pemesanan online.

Meningkatkan Kualitas Pengalaman Wisatawan Pengelolaan pengunjung tidak hanya berdampak pada pelestarian destinasi, tetapi juga meningkatkan kualitas

pengalaman wisatawan. Dengan mengurangi kepadatan pengunjung, wisatawan dapat menikmati suasana yang lebih tenang, aman, dan nyaman. (McCool & Lime, 2001) menjelaskan bahwa penyediaan fasilitas yang memadai, sistem informasi yang jelas, dan pengaturan aliran pengunjung dapat meningkatkan kepuasan wisatawan. Peningkatan pengalaman wisata ini juga terkait dengan peningkatan loyalitas dan niat untuk berkunjung kembali (Choi & Sirakaya, 2006)

Perencanaan Jangka Panjang Berbasis Data Pengelolaan pengunjung yang didukung oleh teknologi informasi memungkinkan pengumpulan data pengunjung secara akurat dan real-time . Data ini sangat penting untuk merancang kebijakan adaptif, menetapkan batas kapasitas tampung, dan merespons tren perubahan perilaku wisatawan, (Hulu dkk., 2021). Dalam jangka panjang, pendekatan ini memperkuat ketahanan destinasi wisata terhadap tekanan eksternal seperti krisis iklim atau pandemi (Mihalic, 2020),

Visitor management merupakan salah satu langkah yang dapat diambil oleh pengelola destinasi, pemerintah, dan operator pariwisata dalam mengelola semua sumber daya yang tersedia untuk mencegah potensi *overtourism*. Hal ini penting diteliti untuk mencari bagaimana solusi yang tepat yang bisa diambil untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pariwisata dan keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat lokal. Maka dari itu penelitian ini mengambil judul “VISITORS MANAGEMENT: TATA KELOLA PENGUNJUNG DESTINASI UNTUK MENGANTISIPASI *OVERTOURISM* DI BALI”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi *overtourism* di kawasan Bali?
2. Bagaimana pengelolaan *overtourism* yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Bali?
3. Apa rekomendasi strategis *visitor management* yang relevan untuk mencegah potensi *overtourism* di destinasi wisata Bali di masa depan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji kondisi *overtourism* di kawasan wisata di Bali (pantai canggu, seminyak, kuta, desa penglipuran, kintamani dan ubud)
2. Mengetahui pengelolaan *overtourism* yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi Bali.
3. Memberikan usulan model *visitor management* yang relevan dengan kondisi Bali guna mencegah potensi *overtourism* di Bali

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat bagi Akademisi, melalui penelitian yang telah dilakukan penulis diharapkan dapat menjadi sarana bacaan dan pertimbangan dalam melakukan penelitian lebih lanjut dengan lingkup yang lebih luas atau hanya sebagai pembaruan penelitian
2. Manfaat bagi pariwisata Pelaku industri pariwisata dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk merancang strategi yang lebih tepat dalam mengelola jumlah wisatawan, memastikan pengalaman wisata yang lebih berkualitas dan ramah terhadap lingkungan serta masyarakat.
3. Manfaat bagi kebijakan pariwisata Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh

pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan pariwisata berkelanjutan yang mengurangi dampak negatif *overtourism* di kawasan wisata Bali dan menjaga kesejahteraan masyarakat lokal.

